

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Daftar isi.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Gambar.....	
BAB I	: PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang.....
1.2.	Landasan Hukum.....
1.3.	Maksud dan Tujuan.....
1.4.	Sistematika Penulisan.....
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan sasaran Renja <u>Perangkat</u> Daerah
3.3	Program dan kegiatan
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan
	Penutup
BAB V	: PENUTUP
LAMPIRAN	:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo merupakan perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Purworejo.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu dan sistematis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang kemudian menjadi DPA- SKPD. Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan SKPD.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Ranwal Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan Ranwal Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu

penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No 65);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14).
 24. Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

25. Peraturan Bupati Puworejo tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, Nomor 127 Tahun 2021 Seri E Nomor 57, tanggal 24 September 2021;
26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
27. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Seri E Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahunan. Maksud di susunnya Rancangan akhir Renja yaitu untuk :

1. Memberikan arah berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Menyediakan acuan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan yang akan dicapai dengan disusunnya Renja adalah:

1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.
2. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan prioritas program/kegiatan tahunan
3. Menjamin kesinambungan perencanaan dan prioritas program

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Dokumen Renja sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada latar belakang berisi pengertian ringkas tentang Ranwal Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Ranwal Renja

Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintahan, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) , mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraian mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - 2) Pencapaian SDGs,
 - 3) Pengentasan kemiskinan,

- 4) Pencapaian NSPK dan SPM,
 - 5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - 6) Pengembangan daerah terisolir,
 - 7) Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- 1) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Rencana Kerja yang memuat Program, Kegiatan, Pagu, Target yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB V PENUTUP

Penutup berisikan :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra DINSOSDUKKBPPPA tahun 2021-2026, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan DINSOSDUKKBPPPA. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022 DINSOSDUKKBPPPA pada tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022.

TABEL T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Purworejo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan layanan	15,47	%	21	%	15,47	%	15,47	%	100%	%			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Pembinaan Penerima bantuan KUBE Fasilitasi dan Pembinaan Penerima bantuan RS RTLH Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penyandang disabilitas yang mendapatkan Bantuan Sosial Jaminan Hidup untuk Penyandang Cacat	100	paket	250	paket	100	paket	100,00	paket	100%	paket			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Pembinaan Penerima bantuan KUBE Fasilitasi dan Pembinaan Penerima bantuan RS RTLH Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penyandang disabilitas yang mendapatkan Bantuan Sosial Jaminan Hidup untuk Penyandang Cacat	100	paket	16	kecamatan	100	paket	100,00	0	100%	0			
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Cakupan Layanan Penanganan Masalah Sosial di Kecamatan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Fasilitasi Karang Taruna Fasilitasi Komda Lansia Fasilitasi LK3	16	kecamatan	16	0	16	kecamatan	16,00	kecamatan	100%	kecamatan			
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang dibina	10	%	10%	%	10	%	100%	%		%			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Luar Panti sosial	Fasilitasi Jaminan Hidup Fasilitasi Mengantar dan Menjemput Penerima Manfaat (disabilitas) ke balai rehabilitasi, panti dan RS Penyuluhan Lanjut Usia	85	orang	85	orang	85	orang	92,00	orang	108%	orang			
	Pemberian Bimbingan Fisik Mental,Spiritual, dan Sosial	Fasilitasi Jaminan Hidup Fasilitasi Mengantar dan Menjemput Penerima Manfaat (disabilitas) ke balai rehabilitasi, panti dan RS Penyuluhan Lanjut Usia	85	orang	85	orang	85	orang	85,00	orang	100%	orang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Fasilitasi eks psikotik layanan PGOT Penguatan Keluarga serta tokoh masyarakat Razia Terlayannya orang terlantar dan anak terlantar	15	orang	45	org	15	orang	15,00	orang		orang			
	Pemberian bimbingan fisik,mental, spiritual dan sosial	Bimbingan dan pembinaan Pengiriman ke panti	20	orang	20	orang	20	orang	20,00	orang	100%	orang			
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang dibina	10,82	%	10,82	%	10,82	%	10,82	%	0	%			
	Pemeliharaan anak - anak terlantar	Logistik Penerima Manfaat di UPT Tat Twam Asi	7	bulan	0	bulan	7	bulan	7,00	bulan	100%	bulan			
	Penjangkauan anak - anak terlantar	Logistik Penerima Manfaat di UPT Tat Twam Asi	7	bulan	12	bulan	7	bulan	7,00	bulan		bulan			
	Rujukan anak - anak terlantar	Operasional rumah singgah Pengiriman anak bermasalah ke panti/Balai rehabilitasi Rekomendasi Pengadopsian anak	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pelaksanaan PKH	25000	Kpm	0	kpm	25000	Kpm	25000,00	Kpm	100%	Kpm			
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pelaksanaan PKH	25000	kpm	0	kpm	25000	kpm	25000,00	kpm	50000	kpm			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Validasi data PMKS dan PSKS Verifikasi dan Validasi data penerima program penanganan fakir miskin	16	kecamatan	16	kecamatan	16	kecamatan	16,00	kecamatan	100%	kecamatan			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		0	0			0	0	0,00						
	Program Penanganan Bencana	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang dibina	10,82	%	0	%	10,82	%	10,82	%		%			
	Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Fasilitasi Kegiatan Penanganan Bendana dari Kementerian sosial dan Dinas sosial provinsiJawa Tengah Operasional Dapur Umum	16	kecamatan	4	paket	16	kecamatan	16,00	kecamatan	16	kecamatan			
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Fasilitasi Kegiatan Penanganan Bendana dari Kementerian sosial dan Dinas sosial provinsiJawa Tengah Operasional Dapur Umum	16	kecamatan	0	kecamatan	16	kecamatan	16,00	kecamatan	100%	kecamatan			
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Penghargaan kepahlawanan	100	%	100	%	100	%	100,00	%	100%	%			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Tali Asih Bagi Keluarga Perintis dan Veteran Miskin Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	20	orang	0	orang	20	orang	20,00	orang	100%	orang			
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Tali Asih Bagi Keluarga Perintis dan Veteran Miskin Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	20	orang	21	orang	20	orang	20,00	orang	0	orang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
		Pemberian Tali Asih Bagi Keluarga Perintis dan Veteran Miskin Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan			12	bulan			0,00	orang	0	orang			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Prosentase capaian kinerja dan keuangan	100	%	100	%	100	%	100,00	%	100%	%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan evaluasi pelaporan	18	dokumen	0	dokumen	18	dokumen	18,00	dokumen	100%	dokumen			
		Dokumen data dasar pembangunan	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	0,00	dokumen	0	dokumen			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan evaluasi pelaporan	1	dokumen	12	dokumen	1	dokumen	1,00	dokumen	100%	dokumen			
	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Dokumen data dasar pembangunan	18	dokumen	12	dokumen	18	dokumen	18,00	dokumen	100%	dokumen			
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tersedianya Gaji ASN	12	bulan	0	dokumen	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
		Dokumen Pelaporan Keuangan	19	dokumen	0	dokumen	19	dokumen	19,00	dokumen	100%	dokumen			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Pelaporan Keuangan	19	dokumen	19	dokumen	19	dokumen	18,00	dokumen	95%	dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran UPT Tat twam asi	12	bulan	100	%	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
		Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelayanan administrasi perkantoran UPT Tat twam asi	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan surat menyurat dan kearsipan	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
		Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
		Layanan kebersihan kantor	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Layanan surat menyurat dan kearsipan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan kebersihan kantor	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Layanan Keamanan Kantor	3	unit	100	%	3	unit	3,00	unit	100%	unit			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Layanan Keamanan Kantor	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12,00	unit	100%	unit			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	12	bulan	0	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor UPT Tat Twam Asi Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	12	bulan	975	m3	12	bulan	12,00	bulan	3	bulan			
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah kelompok perempuan yang dilatih	37	%	40	kel	37	%	37,00	%		%			
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lemabaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Data Pilah Gender Koordinasi PPRG	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1,00	dokumen	1	dokumen			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Data Pilah Gender Koordinasi PPRG	1	dokumen	12	kali	1	dokumen	1,00	kali	0	kali			
		Focal Point Tim Teknis ARG	25	orang	0	orang	25	orang	25,00	orang	0	orang			
		Sosialisasi kegiatan PPRG desa	300	orang	0	orang	300	orang	300,00	orang	0	orang			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Data Pilah Gender Koordinasi PPRG	6	kali	0	dokumen	6	kali	6,00	dokumen	0	dokum en			
	advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi	6	kali	0	kali	6	kali	6,00	kali	100%	kali			
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Pemerintah yang dilatih/dibina	100	lembaga	0	lembaga	100	lembag a	100,00	lembaga	100%	lembag a			
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih,bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak	%	80			%	80	80,00	80		80			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pokjatatap/Satgas GSIB Pembekalan Calon Keluarga TKI	17	kali	3	kali	17	kali	17,00	kali	100%	kali			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi Pokjatatap/Satgas GSIB Pembekalan Calon Keluarga TKI	17	kali	230	kali	17	kali	17,00	kali	100%	kali			
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan Pasca korban Penanganan Pengaduan korban Kekerasan	5	orang	0	orang	5	orang	5,00	orang	100%	orang			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		5	kasus	0	kasus	5	kasus	5,00	kasus	0	kasus			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		12	bulan	0	bulan	12	bulan	12,00	bulan	100%	bulan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Forum Anak Kabupaten Purworejo (FORKARE) Koordinasi dan evaluasi Kabupaten layak anak Penanganan dan Pemenuhan hak anak bermasalah Penyuluhan Pemenuhan Hak anak	1	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	1,00	dokumen	100%	dokumen			
	Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1,3				1,3	1,30	1,3		1,3			
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	update data keluarga	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1	Dokumen			
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	update data keluarga	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1,00	Dokumen	1	Dokumen			
	Pertemuan, Rakor, Rapat - rapat, Tamu kader, Lomba, Sosialisasi, Pembinaan, Pelatihan, Monev, Pembinaan dan Pelatihan petugas dan kader		0	orang	12	orang	0	orang	0,00	orang	0	orang			
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR	11	%	11	%	11	%	11,00	%	11	%			
		Rasio akseptor KB	7,2	%			7,2	%	7,2	%		%			
		Cakupan peserta KB aktif	76,2	%			76,2	%	76,2	%		%			
		Jumlah kelompok KB pria	48	%			48	%	48	%		%			
		Prosentase Jumlah peserta KB Mandiri	37,4	%			37,4	%	37,4	%		%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
		Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	12,6	%			12,6	%	12,6	%		%			
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan pelayanan KIE KKB	100	desa	0	desa	100	desa	100	desa	100%	desa			
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya kegiatan pelayanan KIE KKB	100	desa	494	desa	100	desa	100	desa	100%	desa			
	Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Operasional Balai Penyuluhan KB dan Pendistribusian Alkon	16	balai	0	balai	16	balai	16,00	balai	100%	balai			
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penilaian angka kredit PKB Pergerakan KB bagi ormas	16	orang	0	orang	16	orang	0,00	orang	0	orang			
			25	orang	0	orang	25	orang	0,00	orang	0	orang			
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Akseptor KB bagi keluarga miskin Pelayanan KB	30	akseptor	10	paket	30	akseptor	15,00	akseptor	50%	akseptor			
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Akseptor KB bagi keluarga miskin Pelayanan KB	30	akseptor	557	org	30	akseptor	15,00	akseptor	50%	akseptor			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2021)						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (2026) (%)
	2	3	4		5		6		7		8		9	10	11=10/(target26)
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rehab Gedung Kantor Balai Penyuluhan Tersedianya kendaraan roda dua antar jemput calon akseptor Tersedianya KIT Bina Keluarga Balita (BKB) Kit anti stunting Tersedianya KIT Siap Nikah anti stunting Tersedianya media/alat pengolah data di Balai Penyuluhan KB	1	paket	1	paket	1	paket	0,00	paket	1	paket			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	%	82,18	83	kel	%	82,18	0,00	82,18		82,18			
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang paripurna Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang paripurna Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang paripurna	100 20 100	keluarga keluarga keluarga	4153	kel	100 20 100	keluar ga keluar ga keluar ga	100 20 100	keluarga keluarga keluarga	100 20 100	keluarg a keluarg a keluarg a			
	Pengadaan Saranan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang paripurna Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang paripurna Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang paripurna	100 20 100	keluarga keluarga keluarga	135	kel	100 20 100	keluar ga keluar ga keluar ga	100 20 100	keluarga keluarga keluarga	100 20 100	keluarg a keluarg a keluarg a			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan sosial telah ditangani dengan berbagai macam program dan kegiatan agar para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat segera keluar dari status Penyandang PPKS, atau setidaknya mengurangi atau memberdayakan agar para penyandang PPKS kehidupannya tidak tergantung atau membebani orang lain.

Urusan Sosial didukung dengan Program, yaitu :

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan;
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Program Penanganan Bencana;
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk non urusan keseluruhannya mencapai angka 100% dengan asumsi pada non urusan tidak menyisakan permasalahan pada tahun berikutnya.

Urusan Kependudukan dan keluarga berencana di dukung dengan program yaitu :

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Keluarga Berencana (KB);
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

Turunnya angka kemiskinan pada Renja ini diartikan sebagai tindakan penanganan terhadap penduduk miskin. Target yang direncanakan pada Renja pada empat tahun pertama belum mampu mencapainya dan baru di tahun terakhir mampu melebihi target. Demikian pula prosentase PPKS terhadap jumlah penduduk relatif meningkat dari tahun ketahun. Tidak semua kegiatan dilaksanakan pada awal renja 2016-2021, dikarenakan permasalahan sosial bersifat kasuistik pada waktu tertentu yang tidak dapat diprediksi. Oleh

karena itu pada tabel pelayanan diatas ada beberapa kegiatan pada tahun tertentu ditiadakan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah seperti tertuang dalam evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2021 disajikan seperti pada tabel lampiran T-C.30

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINSOSDALDUKKB
Kabupaten Purworejo

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk			0.35 %				0.35 %				
2	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	V		100%				100%				
3	Optimalnya pelayanan Penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	V		100%				100%				
	Sasaran 2016-2021											
1	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	V		100%								
2	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	V		100%								

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			93,4				94,92				
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			69,05				69,05				
5	Cakupan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Indikator Pemenuhan Hak Anak)			85,00%				8,10%				
6	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)			0,35				0,22				
7	Cakupan Keluarga yang Mendapat Layanan UPPKS			2,70%				1,86%				
8	Cakupan Keluarga yang Mendapat Layanan Tri Bina			63,00%				61,74%				
	Program 2021											
1	Persentase PMKS yang tertangani	V		20,47%				50,15%				
2	Persentase Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses Terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu	V		100%				100%				
3	Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	V		100%				100%				

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Cakupan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang Dibina	V		13,82%				43,54%				
5	Cakupan Penghargaan Kepahlawan	V		100%				100%				
6	Persentase PD Kabupaten yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender			90%				59.52%				
7	Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten			42,00%				23.54%				
8	Persentase Desa yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender dalam Perencanaan Anggaran Desa			100%				19.02%				
9	Cakupan Ketersediaan Tenaga Pelayanan Pengaduan Terlatih,Bantuan Hukum Untuk Mendampingi Korban dan Saksi dan Layanan Pemulangan Korban Perempuan dan Anak			100%				100%				
10	Persentase Penanganan Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak			100%				100%				

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak			82,00%				81,50%				
12	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.			87,00%				93,00%				
13	Jumlah Kelompok Perempuan yang Dilatih			50				90 orang				
14	Rata-rata jumlah anak per keluarga			1,3				0.84				
15	Rasio Akseptor KB			10,80%				11,31%				
16	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) paripurna			22,72%				19,50%				
17	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna			44,72%				37,94%				
18	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna			24,19%				20,73%				
19	Persentase Anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB			84,18%				83,84%				
20	Jumlah Kelompok KB Pria			53				48				
21	Cakupan peserta KB aktif			83,05%				70,90%				

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeetneed)			7,00%				12,36%				
23	Persentase Remaja yang Diberikan Penyuluhan KRR			11,00%				10,50%				
24	Persentase Jumlah Peserta KB Mandiri			44,05%				38,76%				
25	Jumlah Pasangan Usia Subur Miskin yang Terlayani KB			2.789				2790				
	Tujuan 2021-2026											
1	Persentase Penurunan Kelompok Rumah Tangga 20% berpenghasilan terendah dari DTKS	V			33,19	31,42	29,75			31,42	29,75	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	V			100%	100%	100%			100%	100%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	V			100%	100%	100%			100%	100%	
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	V			0,26	0,26	0,26			0,26	0,26	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran 2022											
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)) yang tertangani	V			100%	100%	100%		30%	100%	100%	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	V			100%	100%	100%		30%	100%	100%	
3	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai standar	V			50%	70%	80%		30%	70%	80%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				100%	100%	100%			100%	100%	
5	TFR (Total Fertility Rate)				2,1	2,1	2,1			2,1	2,1	
	Program 2022											
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	V			90%	93	95%		7,90%	93	95%	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	V			100%	100%	100%		65%	100%	100%	
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	V			100%	100%	100%		54%	100%	100%	
4	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	V			69,47	69,47	69,47		24%	69,47	69,47	
5	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	V			100	100	100		45%	100	100	
6	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	V			50	70	80		30%	70	80	
7	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100	100	100		60%	100	100	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Age Specific Fertility Rate (ASFR)				17	17	16		30%	17	16	
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) / Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern				52,82	53,49	54,09		30%	53,49	54,09	
10	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)				21,81	21,28	20,83			21,28	20,83	
11	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina				63,3	63,55	63,9		30%	63,55	63,9	
12	Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB				84,22	84,3	84,4		45%	84,3	84,4	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah suatu kondisi yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam suatu perencanaan karena berdampak yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Apabila isu strategis tidak diantisipasi diperkirakan akan menimbulkan permasalahan atau kerugian yang lebih besar. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis apabila tidak dimanfaatkan (diantisipasi) akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berbagai informasi isu strategis dapat berasal dari internal Perangkat Daerah maupun Eksternal Perangkat Daerah. Tidak semua informasi tentang isu strategis dapat diangkat menjadi isu strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan telah diketahuinya metode identifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka langkah berikutnya mengumpulkan dan mengelompokkan berdasarkan urusan. Berikut adalah isu strategis berdasarkan urusan.

1. Isu Strategis Urusan Sosial
 - a. Belum optimalnya penanganan PMKS
 - b. Masih kurangnya PMKS yang memiliki akses dan ikut berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
 - c. Tingginya masyarakat yang memiliki RTLH
 - d. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
2. Isu Strategis urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:

Pada dasarnya masalah kependudukan berkaitan dengan tiga aspek yaitu: kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk. Adapun isu strategis terkait program pengendalian penduduk dan keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera antara lain:

- a. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
- b. Masih rendahnya kesadaran kaum pria tentang kepesertaan KB
- c. Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ikut KB
- d. Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49)
- e. Masih tingginya Angka Kelahiran pada remaja usia 15 – 18 tahun (ASFR 15 -19 tahun), yang disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran bagi remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
- f. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan/ kelompok kegiatan Tribina (BKB,BKR,BKL)
- g. Belum optimalnya pemberdayaan UPPKS yang merupakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga
- h. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kependudukan yang tepat dan akurat.

2.4. Review Terhadap RKPD

Tabel T.C. 31
Reviu Terhadap RKPD Tahun 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Tengah /Purworejo
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5.697.541.640					5.697.541.640	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	93%	82.580.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	93%	82.580.000	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelaksanaan Undian yang Mendapatkan Ijin	100%	1.689.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelaksanaan Undian yang Mendapatkan Ijin	100%	1.689.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1.689.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1.689.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	90%	80.891.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	90%	80.891.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	16.940.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	16.940.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 sertifikat	63.951.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 sertifikat	63.951.000	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	100%	3.728.100	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	100%	3.728.100	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Terfasilitasinya Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	100%	3.728.100	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Terfasilitasinya Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	100%	3.728.100	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	3.728.100	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	3.728.100	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100%	368.157.436	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100%	368.157.436	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	363.923.036	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	363.923.036	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Permakanan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	49 orang	189.209.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	49 orang	189.209.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	7.704.900	Penyediaan Sandang	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	7.704.900	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	72.515.600	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	72.515.600	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	39.438.400	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	39.438.400	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.929.400	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.929.400	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	49.125.736	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	49.125.736	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	4.234.400	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	4.234.400	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.234.400	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.234.400	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	69,47%	4.959.942.736	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	69,47%	4.959.942.736	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	393.729.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	393.729.000	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	393.729.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	393.729.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.566.213.736	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.566.213.736	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12000 Orang	339.996.936	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	12000 Orang	339.996.936	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	80 Keluarga	6.775.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	80 Keluarga	6.775.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	270 Keluarga	3.167.892.600	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	270 Keluarga	3.167.892.600	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	1.051.549.200	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	1.051.549.200	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100%	184.230.100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100%	184.230.100	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kot a		Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	135.569.600	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kot a		Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	135.569.600	
	Penyediaan Makanan	Kab. Purwor ejo, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	71.963.700	Penyediaan Makanan	Kab. Purwor ejo, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	71.963.700	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Sandang	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	29.568.400	Penyediaan Sandang	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	29.568.400	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	19.469.300	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	19.469.300	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	14.568.200	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	14.568.200	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a		Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana	100%	48.660.500	Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a		Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana	100%	48.660.500	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Purwor ejo, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampu ng	19.953.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Purwor ejo, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampu ng	19.953.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Purwor ejo, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	28.707.500	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Purwor ejo, Semua Kecam atan, Semua Kelura han	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	28.707.500	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	70%	98.903.268	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	70%	98.903.268	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	20%	98.903.268	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	20%	98.903.268	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	42.350.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	42.350.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	431 Makam	44.873.800	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	431 Makam	44.873.800	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	11.679.468	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	11.679.468	
					15.028.152.387					15.028.152.387	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	5.379.699.528	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	5.379.699.528	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2Dokumen	58.133.268	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2Dokumen	58.133.268	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	48.145.568	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	48.145.568	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		han					han				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	9.987.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	9.987.700	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.673.622.552	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.673.622.552	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.638.586.684	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.638.586.684	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	35.035.868	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	35.035.868	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	188.341.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	188.341.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.041.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.041.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3Paket	25.615.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3Paket	25.615.600	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		han					han				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	93.570.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	93.570.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.597.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.597.600	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.252.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.252.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	17.930.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	17.930.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.334.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.334.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	266.095.608	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	266.095.608	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.170.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.170.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	204.925.608	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purworjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	204.925.608	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	193.506.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	193.506.600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	132.044.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	132.044.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	12.294.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	12.294.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwor ejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	3 Unit	41.224.600	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwor ejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	3 Unit	41.224.600	
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwor ejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	8 Unit	7.944.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwor ejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	8 Unit	7.944.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Age Specific Fertility Rate (ASFR)	17%	192.670.400	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Age Specific Fertility Rate (ASFR)	17%	192.670.400	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersusunnya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen	29.867.500	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tersusunnya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen	29.867.500	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.867.500	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	29.867.500	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	162.802.900	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	162.802.900	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	26.002.900	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	26.002.900	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	136.800.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	136.800.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21,28%	5.789.930.081	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21,28%	5.789.930.081	
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53,49%				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53,49%		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	100%	1.137.360.168	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	100%	1.137.360.168	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	41 Organisasi	12.499.400	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	41 Organisasi	12.499.400	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	116.620.768	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	116.620.768	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	70.640.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	70.640.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes)	16 Laporan	249.600.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes)	16 Laporan	249.600.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	648.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	648.000.000	
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	40.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	40.000.000	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	100%	2.394.450.600	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	100%	2.394.450.600	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (BKB/PLKB)	1 Laporan	23.250.600	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (BKB/PLKB)	1 Laporan	23.250.600	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	494 Orang	2.371.200.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	494 Orang	2.371.200.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	100%	1.550.869.313	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	100%	1.550.869.313	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59 Laporan	23.850.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59 Laporan	23.850.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5889 orang	1.504.956.313	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5889 orang	1.504.956.313	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27 Laporan	19.200.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27 Laporan	19.200.000	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	32 Orang	2.863.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	32 Orang	2.863.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Terlaksananya Kampung KB yang melakukan pembinaan	41 Kampung KB	707.250.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Terlaksananya Kampung KB yang melakukan pembinaan	41 Kampung KB	707.250.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	41 Kampung KB	707.250.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	41 Kampung KB	707.250.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga Yang Mendapat Layanan Tribina	63,55%	3.665.852.378	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga Yang Mendapat Layanan Tribina	63,55%	3.665.852.378	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	84,30%				Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	84,30%		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksananya Pembangunan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kelompok	3.612.520.135	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksananya Pembangunan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kelompok	3.612.520.135	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	330.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	330.000.000	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7661 Orang	3.259.100.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7661 Orang	3.259.100.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Laporan	23.420.135	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,P PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Laporan	23.420.135	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terpenuhinya Kepesertaan ber KB bagi Anggota UPPKS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	3 organisasi	53.332.243	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terpenuhinya Kepesertaan ber KB bagi Anggota UPPKS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	3 organisasi	53.332.243	

No	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 organisasi	53.332.243	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 organisasi	53.332.243	
					20.725.694.027					20.725.694.027	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah dilakukan Sosialisasi Program dan Kegiatan dimaksud pada saat Forum PD. Hadir dalam Forum tersebut

Hasil dari usulan Program dan Kegiatan Masyarakatn sesuai dengan Tabel 3.2. berikut.

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Panti Rehabilitasi			1 Gedung	usulan Musrenbang
2	KUBE PEKSI MANDIRI	Kel Sucenjurutengah Kec. Bayan Purworejo		1	Pokir
3	KUBE GUYUP RUKUN	DESA kalikalong Kec. Loano Purworejo		1	Pokir
4	KUBE TIRTO SARI	Desa Ngargosari Kec. Loano Purworejo		1	Pokir
5	KUBE	Desa Tepansari Kec. Loano Purworejo		1	Pokir
6	KUBE MAJU MULYO	Desa Banyuasin Separe Kec. Loano Purworejo		1	Pokir
7	KUBE GEBANG MULYA	Desa Gebang Kec. Gebang Purworejo		1	Pokir
8	KUBE MAKMUR JAYA	Desa Bendosari Kec. Gebang		1	Pokir
9	KUBE RIZKY BAROKAH	Desa Sedayu Kec. Loano Purworejo		1	Pokir
10	KUBE BINTANG ABADI	Desa Kedung Poh Kec. Loano Purworejo		1	Pokir
11	KUBE MAKMUR LESTARI	Desa Tlogosono Kec. Gebang Gebang		1	Pokir
12	KUBE PENUNGKULAN MULYO	Desa Penungkulan Kec. Gebang Purworejo		1	Pokir
13	KUBE PUTRA MAKMUR	Desa Nglaris Kecamatan Bener		1	Pokir
14	KUBE DADI MULYO	Desa Redin Kec.		1	Pokir

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Gebang Purworejo			
15	KUBE JOLODORO MULYO	DEsa Guntur Kec. Bener Purworejo		1	Pokir
16	KUBE BERSAMA MAJU	Desa Pakem Kec. Gebang Purworejo		1	Pokir
17	KUBE SABAR SARINO	Desa Tlogosono Kec. Gebang Purworejo		1	Pokir
18	KUBE BERKAH TANI	Desa Tepansari Kec. Loano Purworejo		1	Pokir
19	KUBE NGAGLIK MULYO	Desa Ngaglik Kec. Gebang Purworejo.		1	Pokir
20	KUBE KUWUREJO JOYO	Desa Kuwurejo Kec. Kutoarjo Purworejo		1	Pokir
21	KUBE JAYA BERKAH LANGGENG	Desa Nglaris Kec. Bener Purworejo		1	Pokir
22	KUBE MUSTIKA	Desa Jati Kec. Bener Purworejo		1	Pokir
23	KUBE BAROKAH	Desa Mayungsari Kec. Bener Purworejo		1	Pokir
24	KUBE BUNGA BANGSA	Desa Benowo Kec. Bener Purworejo		1	Pokir
25	KUBE MAKMUR ABADI	Desa Bleber Kec. Bener. Purworejo		1	Pokir
26	KUBE MAKMUR	Desa Gebang Kec. Gebang Purworejo		1	Pokir
27	KUBE BAROKAH	Desa Kalirejo Kec. Grabag Purworejo		1	Pokir
28	KUBE GADING MAKMUR	Desa Pasaranom Kec. Grabag Purworejo		1	Pokir
29	KUBE MUKTI SEJAHTERA	DEsa Dudu Kulon Kec. Grabag Purworejo		1	Pokir
30	KUBE SARI MULYO	DesaMunggangsari Kec. Grabag Purworejo		1	Pokir
31	KUBE PANCENG MAKMUR	Desa Pakisarum Kec. Bruno Purworejo		1	Pokir
32	KUBE HARAPAN TANI	Desa Pakisarum Kec. Bruno Purworejo		1	Pokir
33	KUBE TANI JAYA	Desa Pakisarum Kec. Bruno		1	Pokir

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Purworejo			
34	KUBE MAWAR	Desa Pakisarum Kec. Bruno Purworejo		1	Pokir
35	KUBE DOMPON	Desa Samping Kec. Kemiri Purworejo		1	Pokir
36	KUBE MANUNGAL MAKARYO	Desa Samping Kec. Kemiri Purworejo		1	Pokir
37	KUBE LEMAH GUNTUR	Desa Samping Kec. Kemiri Purworejo		1	Pokir
38	KUBE MBAH PORONG	Desa Samping Kec. Kemiri Purworejo		1	Pokir
39	KUBE MUGI RAHAYU	Desa Samping Kec. Kemiri Purworejo		1	Pokir
40	KUBE MANDIRI	Desa Bayan Kec.Bayan Purworejo		1	Pokir
41	KUBE MAJU JAYA	Desa Bayan Kec.Bayan Purworejo		1	Pokir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dapat dilihat dari tugas dan fungsi masing – masing kementerian adalah sebagai berikut :

3.1.1 Sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Sosial

Sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode 2020-2024 yang tercantum dalam RPJMN 2020 -2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam mainstreaming ini memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional. Keenam pengarusutamaan dalam RPJMN terdiri dari:

- 1) Pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan,
- 2) Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan,
- 3) Pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya,
- 4) Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim yang menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan

mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon,

- 5) Pengarusutamaan modal sosial budaya sebagai strategi internalisasikan nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan,
- 6) Transformasi digital; Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional. Kementerian Sosial mendukung pengarusutamaan RPJMN dengan indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi.

3.1.2 Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan;
- b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
- c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapaian target kinerja;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar;
- e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi pemetaan proses bisnis, penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan;
- f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja.

3.1.3 Arah Kebijakan BKKBN

Arah kebijakan BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan Strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, adapun arah kebijakan dan strateginya adalah sebagai berikut :

1. Pertama, menguatnya pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai, mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi, yang dapat diwujudkan melalui strategi :
 - a. Pengembangan GDPK lima pilar untuk seluruh tingkatan wilayah di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perenanaan pembangunan daerah
 - b. Penguatan sinergisitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk
 - c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan institusi pendidikan dari pusat, provinsi serta kabupaten dan kota dalam bidang pengendalian penduduk
2. Kedua, peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan, meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat) yang dapat terwujud melalui strategi :
 - a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan KB Pasca Persalinan (KB-PP)
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi melalui penguatan kemitraan
 - c. Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus (daerah kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan)
 - d. Peningkatan kepesertaan KB Pria melalui pengautan peran motivator/kelompok KB Pria dan pemenuhan tenaga kesehatan MOP yang kompeten di setiap kabupaten/kota

- e. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup
3. Ketiga, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga, yang diwujudkan melalui strategi
 - a. Penguatan kemampuan keluarga untuk menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal sesuai dengan siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran guna mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
 - b. Peningkatan kualitas/ketahanan remaja (Kelompok Usia Produktif) dan Penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja
 - c. Penguatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang terstandarisasi dan pengembangan sistem rujukan yang dapat diimplementasikan di seluruh tingkatan wilayah
 - d. Pembentukan dan pengautan karakter sejak dini melalui keluarga
 4. Keempat, meningkatkan advokasi dan pergerakan Program KKBPK sesuai dengan segmentasi sasaran dan karakteristik wilayah, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. Peningkatan advokasi Program KKBPK berbasis dan menfaat serta pendekatan sosial kultural
 - b. Peningkatan promosi Program KKBPK (Bangga Kencana) berdasarkan orientasi sasaran berbasis karakteristik wilayah
 - c. Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui pergerakan kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penyukuhan Program KKBPK dan penyebaran informasi.
 5. Kelima, memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi dengan strategi :
 - a. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program KKBPK berbasis teknologi informasi di seluruh tingkat wilayah
 - b. Pengembangan smart technology untuk memperkuat pengelolaan Program KKBPK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2023 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2023 yaitu: **“Purworejo Berdaya Saing 2025”**

Misi Bupati Purworejo periode 2023 ada sebanyak 5 (lima) misi. Dari ke 5 misi tersebut ada 3 misi yang erat hubungannya dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Misi 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat

Misi ini memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan, serta Pengurangan Tingkat Pengangguran*. Tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia diukur keberhasilannya dengan indikator angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan didukung dengan 6 (enam) sasaran yaitu: 1) *Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat* yang diukur melalui angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); 2) *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* yang diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH); 3) *Meningkatnya Ketahanan Pangan* yang diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan; 4) *Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk* yang diukur melalui indikator laju pertumbuhan penduduk; 5) *Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender* yang diukur melalui angka Indeks Pembangunan Gender (IPG); serta 6) *Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga* yang diukur melalui persentase organisasi kepemudaan dan olahraga yang aktif.

Tujuan penurunan angka kemiskinan diukur keberhasilannya dengan indikator angka kemiskinan dan didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu *Berkurangnya*

Penduduk Miskin yang diukur melalui indikator persentase penurunan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah. Sedangkan tujuan pengurangan tingkat pengangguran diukur keberhasilannya dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu *Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja* yang diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 yang dijabarkan dalam 8 (delapan) sasaran tersebut dimaksudkan untuk memastikan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo unggul dalam arti sehat dan sejahtera, terjamin kualitas pendidikannya secara adil dan inklusif, mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan melindungi hak anak, serta mencapai pembangunan pemuda dan olahraga. Di samping itu, menurunkan angka kemiskinan juga menjadi tujuan dalam perwujudan misi pertama dalam pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2023.

Tujuan ini sejalan pula dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk (*Goal 1 TPB*), mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan gizi (*Goal 2 TPB*), menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat (*Goal 3 TPB*), mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak (*Goal 5 TPB*), serta mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyediaan akses kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua (*Goal 8 TPB*).

Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan *Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia* yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Tujuan ini

didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu: 1) *Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel* yang diukur melalui indikator nilai Maturitas SPIP, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2) *Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel* yang diukur melalui indikator Indeks Sistem Merit; serta 3) *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima* yang diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Tata kelola kelembagaan berkelas dunia yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Sistem birokrasi dan pelayanan publik yang dinamis, efektif, efisien, dan terbuka dalam menyerap partisipasi dan aspirasi publik menjadi kondisi yang ingin diwujudkan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Purworejo.

Tujuan dan sasaran dalam misi ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (*Goal 16 TPB*) serta memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (*Goal 17 TPB*).

Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi

Misi ini memiliki tujuan *Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan* yang keberhasilannya diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana (IRB). Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut: 1) *Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum* yang diukur melalui indikator Indeks Infrastruktur Daerah; 2) *Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan* yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Daerah (IKLHD); serta 3) *Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana* yang diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah.

Tujuan peningkatan infrastruktur berbasis kebencanaan dan lingkungan hidup berkelanjutan yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur tangguh bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui tujuan dan sasaran pada misi ini, ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan diharapkan akan dapat tercapai (*Goal 5 TPB*). Selain itu, penjaminan akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern (*Goal 7 TPB*) serta pembangunan infrastruktur sarana prasarana yang tangguh, industrialisasi inklusif, berkelanjutan, dan pengembangan inovasi (*Goal 9 TPB*) juga menjadi hasil akhir yang akan dicapai melalui tujuan dan sasaran ini.

Di sisi lingkungan, pembangunan permukiman yang aman, tangguh, dan berkelanjutan (*Goal 11 TPB*) menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat letak geografis Kabupaten Purworejo yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, baik bencana alam maupun bencana akibat perubahan iklim dan dampaknya (*Goal 13 TPB*). Upaya lain yang dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran ini adalah dengan melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, serta mengurangi degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati (*Goal 15 TPB*).

Dari 3 misi tersebut ada 4 Tujuan yang berkaitan erat dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Penurunan Angka Kemiskinan.
3. Tata Kelola Kelembagaan
4. Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan & Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Ada 4 Sasaran yang searah dengan Tupoksi Dinas Sosial
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
- 2. Berkurangnya Penduduk Miskin
- 3. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
- 4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima
- 5. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dapat disajikan pada tabel berikut :

TABEL 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Misi 1: Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat			
Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS))	Meningkatkan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Pelayanan yang Optimal dan Peningkatan Kualitas Data yang valid dan Peningkatan Kualtias Layanan PPKS	Peningkatan Kualitas Pelayanan terhadap PPKS dengan meningkatkan kualitas pendataan PPKS dan Peningkatan Kualtias Layanan PPKS
	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	Meningkatkan Kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui Pembinaan yang terarah sesuai sop	Optimalisasi Pemanfaatan PSKS sesuai dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Meningkatkan Partisipasi dan Perannya
Meningkatknya Akses Bantuan Sosial Bagi Penduduk Miskin	Meningkatnya Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapat Layanan Bantuan Sosial	Meningkatkan Jumlah Penduduk Miskin yang Mendapat Layanan Bantuan Sosial melalui pendataan yang optimal	Optimalisasi tenaga pendataan agar bisa mendaptkan data yang valid sesuai dengan aturan yang ada

Peningkatan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan KS	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan KS melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan KB dan KS	Peningkatan Kualitas Pelayanan KB dan KS dengan Peningkatan Kesertaan KB, Pembinaan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Taman Makam Pahlawan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Taman Makam Pahlawan melalui Rehabilitasi lokasi taman pahlawan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Taman Makam Pahlawan melalui Rehabilitasi lokasi taman pahlawan dan penambahan tenaga
Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.			
Peningkatan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar orban Bencana pada Saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	Meningkatnya Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial yang tepenuhi Kebutuhan Dasarnya	Meningkatkan Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial yang tepenuhi Kebutuhan Dasarnya	Peningkatan Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial yang tepenuhi Kebutuhan Dasarnya
Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan melalui layanan yang optimal	Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan melalui layanan yang optimal dengan membuka layanan secara online

3.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Perumusan Program dan Kegiatan

Visi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Purworejo Berdaya Saing 2025”**

Misi Bupati Purworejo periode 2021-2026 ada sebanyak 5 (lima) misi. Dari ke 5 misi tersebut ada 3 misi yang erat

hubungannya dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Misi 1: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat

Misi ini memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan, serta Pengurangan Tingkat Pengangguran*. Tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia diukur keberhasilannya dengan indikator angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan didukung dengan 6 (enam) sasaran yaitu: 1) *Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat* yang diukur melalui angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); 2) *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat* yang diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH); 3) *Meningkatnya Ketahanan Pangan* yang diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan; 4) *Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk* yang diukur melalui indikator laju pertumbuhan penduduk; 5) *Terwujudnya Kesetaraan Pembangunan Gender* yang diukur melalui angka Indeks Pembangunan Gender (IPG); serta 6) *Terwujudnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga* yang diukur melalui persentase organisasi kepemudaan dan olahraga yang aktif.

Tujuan penurunan angka kemiskinan diukur keberhasilannya dengan indikator angka kemiskinan dan didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu *Berkurangnya Penduduk Miskin* yang diukur melalui indikator persentase penurunan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah. Sedangkan tujuan pengurangan tingkat pengangguran diukur keberhasilannya dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja yang diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi tujuan pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam 8 (delapan) sasaran tersebut dimaksudkan untuk memastikan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo unggul dalam arti sehat dan sejahtera, terjamin kualitas pendidikannya secara adil dan inklusif, mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan melindungi hak anak, serta mencapai pembangunan pemuda dan olahraga. Di samping itu, menurunkan angka kemiskinan juga menjadi tujuan dalam perwujudan misi pertama dalam pembangunan Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2026.

Tujuan ini sejalan pula dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk (*Goal 1 TPB*), mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan gizi (*Goal 2 TPB*), menjamin kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi seluruh masyarakat (*Goal 3 TPB*), mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan anak (*Goal 5 TPB*), serta mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyediaan akses kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua (*Goal 8 TPB*).

Misi 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Misi ini memiliki tujuan untuk mewujudkan *Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia* yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu: 1) *Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel* yang diukur melalui indikator nilai Maturitas SPIP, Opini Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 2) *Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel* yang diukur melalui indikator Indeks Sistem Merit; serta 3) *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima* yang diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Tata kelola kelembagaan berkelas dunia yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran tersebut dimaksudkan sebagai salah satu upaya dalam implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Sistem birokrasi dan pelayanan publik yang dinamis, efektif, efisien, dan terbuka dalam menyerap partisipasi dan aspirasi publik menjadi kondisi yang ingin diwujudkan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Purworejo.

Tujuan dan sasaran dalam misi ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan (*Goal 16 TPB*) serta memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (*Goal 17 TPB*).

Misi 5: Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi

Misi ini memiliki tujuan *Peningkatan Infrastruktur Berbasis Kebencanaan dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan* yang keberhasilannya diukur melalui indikator Indeks Risiko Bencana (IRB). Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut: 1) *Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Umum* yang diukur melalui indikator Indeks Infrastruktur Daerah; 2) *Terkelolanya Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan* yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD); serta 3) *Meningkatnya Ketahanan Daerah*

terhadap Bencana yang diukur melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah.

Tujuan peningkatan infrastruktur berbasis kebencanaan dan lingkungan hidup berkelanjutan yang didukung dengan 3 (tiga) sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur tangguh bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Melalui tujuan dan sasaran pada misi ini, ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan diharapkan akan dapat tercapai (*Goal 5 TPB*). Selain itu, penjaminan akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern (*Goal 7 TPB*) serta pembangunan infrastruktur sarana prasarana yang tangguh, industrialisasi inklusif, berkelanjutan, dan pengembangan inovasi (*Goal 9 TPB*) juga menjadi hasil akhir yang akan dicapai melalui tujuan dan sasaran ini.

Di sisi lingkungan, pembangunan permukiman yang aman, tangguh, dan berkelanjutan (*Goal 11 TPB*) menjadi hal yang perlu diperhatikan mengingat letak geografis Kabupaten Purworejo yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, baik bencana alam maupun bencana akibat perubahan iklim dan dampaknya (*Goal 13 TPB*). Upaya lain yang dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran ini adalah dengan melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, serta mengurangi degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati (*Goal 15 TPB*).

Dari 3 misi tersebut ada 4 Tujuan yang berkaitan erat dengan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

Ada 4 Sasaran yang searah dengan Tupoksi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Penurunan Angka Kemiskinan

3. Tata Kelola Kelembagaan
4. Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana

3.4 Program dan Kegiatan yang Mendukung Penegarusutamaan Gender

Program dan kegiatan yang mendukung penegarusutamaan gender di Dinsosdaldukkb adalah Program Keluarga Berencana pada Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Sub Kegiatan tersebut menyasar pada perempuan untuk mendukung Program Keluarga Berencana dengan menggunakan Kontrasepsi yang berjangka panjang. Sub Kegiatan tersebut mendapat alokasi anggaran Rp. 1.504.956.313,-. Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana.

2. Sub Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya. Anggaran Sub Kegiatan mendapat alokasi anggaran Rp. 19.200.000,-.

3.5 Program dan Kegiatan

A. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2.4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

B. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
 - 1.1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

C. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - 1.1. Penyediaan Permakanan
 - 1.2. Penyediaan Sandang
 - 1.3. Penyediaan Alat Bantu
 - 1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - 1.5. Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial
 - 1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - 1.7. Pemberian Layanan Rujukan

D. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pemeliharaan Anak – Anak Terlantar.

- 1.1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 1.2. Rujukan Anak-Anak Terlantar
- 1.3. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 2.4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

E. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - 1.1. Penyediaan Makanan
 - 1.2. Penyediaan Sandang
 - 1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - 1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2.1. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - 2.2. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

F. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 1.1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- 1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
- 1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

Urusan Pememrintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan dalam program tersebut sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1.1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
 - 1.2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - 1.3. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
 - 1.4. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan

- 1.5. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
- 1.6. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - 2.2. Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - 2.3. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
 - 2.4. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
 - 2.5. Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - 2.6. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

C. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Pelaksanaan, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - 1.1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - 1.2. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1.3. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - 1.4. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 2.1. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk

Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

- 2.2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 3.2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 3.3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 3.4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 3.5. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
 - 3.6. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 3.7. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 - 3.8. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
 - 3.9. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - 3.10. Peningkatan Kesertaan KB Pria
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

- 4.1. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 4.2. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- 4.3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1.1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 1.2. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 1.3. Penyerdiaan dan Pengembangan Materi IPK
 - 1.4. Advokasi dan Promosi IPK
 - 1.5. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 2.1. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 2.2. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

- 2.3. Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 2.4. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Tabel 3.2.

Rumusan Awal Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur		Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									5,697,541,640				3,022,968,837			
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									82,580,000				107,264,300			
1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota									1,689,000				2,200,000			
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Pelaksanaan Undian yang Mendapatkan Ijin	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,00 %	1 Dokumen	100 %	1,689,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	93,00 %	2,200,000			
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									80,891,000				105,064,300			
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tercapainya Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,00 %	30 Orang	90 %	16,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	93,00 %	22,000,000			
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tercapainya Peningkatan Kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,00 %	6 Sertifikat	90 %	63,951,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	93,00 %	83,064,300			
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN									3,728,100				4,842,530			
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal									3,728,100				4,842,530			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	3,728,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	100 %	4,842,530
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								368,157,436			573,964,490		
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								363,923,036			562,964,490		
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar LanjutUsia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	79 Orang	100 %	189,209,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100 %	284,028,910
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar LanjutUsia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	108 Orang	100 %	7,704,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100 %	13,756,050
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar LanjutUsia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	72,515,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100 %	180,721,310

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar LanjutUsia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	40 Orang	100 %	39,438,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100 %	53,619,720
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar LanjutUsia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Orang	100 %	5,929,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100 %	15,734,950
1	6	4	2.01	1 2	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar LanjutUsia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 Orang	100 %	49,125,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100 %	15,103,550
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								4,234,400				11,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	4	2.02	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) LainnyaBukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	4,234,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	100 %	11,000,000
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								4,959,942,736				1,924,048,175	
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar								393,729,000				511,422,560	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Anak Terlantar	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,47 %	12 Orang	100 %	393,729,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	69,47 %	511,422,560
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								4,566,213,736				1,412,625,615	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,47 %	3000 Orang	100 %	339,996,936	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	69,47 %	522,826,630
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,47 %	80 Keluarga	100 %	6,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	69,47 %	8,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,47 %	270 Keluarga	100 %	3,167,892,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	69,47 %	525,756,770
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,47 %	2000 Orang	100 %	1,051,549,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	69,47 %	355,242,215
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								184,230,100			239,318,420		
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								135,569,600			176,122,540		
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	75 Orang	100 %	71,963,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	93,498,900
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	29,568,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	38,401,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Orang	100 %	19,469,300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	25,302,420
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	100 %	14,568,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	18,920,220
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							48,660,500				63,195,880		
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Kampung	100 %	19,953,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	25,913,360
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	47 Orang	100 %	28,707,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100 %	37,282,520
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							98,903,268				173,530,922		
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							98,903,268				173,530,922		
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,00 %	1 Dokumen	20 %	42,350,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	70, 00 %	85,171,900

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
							Kabupaten/Kota												
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,00 %	431 Makam	20 %	44,873,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	70,00 %	62,956,520	
1	6	7	2.01	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,00 %	12 Laporan	20 %	11,679,468	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	70,00 %	25,402,502	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								15,028,152,387				15,258,548,207		
2	14	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,379,699,528				6,013,898,607		
2	14	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								58,133,268				83,972,095		
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	19 Dokumen	2 dokumen	48,145,568	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	61,293,285	
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	2 dokumen	9,987,700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	22,678,810	
2	14	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,673,622,552				5,104,754,893		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
2	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 Orang/bulan	100 %	4,638,586,68 4	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	5,065,291,1 08
2	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 Laporan	100 %	35,035,868	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	39,463,785
2	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								188,341,500	308,054,89 0				
2	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	7 dokumen	6,041,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	6,645,650
2	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	7 dokumen	25,615,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	28,177,160
2	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	7 dokumen	93,570,800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	104,624,52 0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
2	1 4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	7 dokumen	15,597,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	17,157,360
2	1 4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 dokumen	3,252,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	3,577,200
2	1 4	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Paket	7 dokumen	17,930,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	30,925,400
2	1 4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	7 dokumen	26,334,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	116,947,600
2	1 4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								266,095,608			292,705,169		
2	1 4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	2 Laporan	61,170,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	67,287,000
2	1 4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	2 Laporan	204,925,608	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	225,418,169
2	1 4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								193,506,600			224,411,560		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)
2	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	41 Unit	4 Jenis	132,044,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	141,428,00 0
2	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	4 Jenis	12,294,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	16,892,700
2	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	4 Jenis	41,224,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	54,565,060
2	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	4 Jenis	7,944,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	11,525,800
2	1	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								192,670,400			234,700,000		
2	1	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								29,867,500			64,130,000		
2	1	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan PemerintahKabupa ten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 %	1 Dokumen	1 dokumen	29,867,500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Age Specific Fertility Rate (ASFR)	17 %	64,130,000
2	1	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								162,802,900			170,570,000		
2	1	2	2.02	1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua	17 %	1 Dokumen	1 dokumen	26,002,900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		Age Specific Fertility Rate (ASFR)	17 %	33,770,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)
									Kelurahan					Umum				
2	1 4	2	2.02	1 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 %	1 Dokumen	1 dokumen	136,800,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Age Specific Fertility Rate (ASFR)	17 %	136,800,00 0
2	1 4	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								5,789,930,0 81	4,914,849, 600				
2	1 4	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								1,137,360,1 68	974,000,00 0				
2	1 4	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	25 Organisasi	100 %	12,499,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21, 28 %	16,500,000
						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern				53,49 %				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern		53, 49 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1	4	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	3 Dokumen	100 %	116,620,768	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21, 28 %	132,000,000
						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern					53,49 %						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53, 49 %	
2	1	4	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	3 Dokumen	100 %	70,640,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21, 28 %	0

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)
2	1	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	16 Laporan	100 %	249,600,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21, 28 %	249		
	4					Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern				53,49 %					Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53, 49 %			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)
2	1 4	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	16 Laporan	100 %	648,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21,28 %	785,250,400
						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern				53,49 %						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53,49 %	
2	1 4	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	1 Laporan	100 %	40,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21,28 %	40,000,000
						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern				53,49 %						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53,49 %	
2	1 4	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								2,394,450,600				1,402,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
2	1	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Peny uluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	1 Laporan	100 %	23,250,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21, 28 %	27,500,000
						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern				53,49 %						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53, 49 %	
2	1	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	494 Orang	100 %	2,371,200,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21, 28 %	1,375,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)
2	1 4	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					1,550,869,3 13				1,669,200,000				
2	1 4	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	48 Laporan	100 %	23,850,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21,28 %	143,000,000
						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern				53,49 %						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53,49 %	
2	1 4	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	5059 Orang	100 %	1,504,956,313	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21,28 %	1,501,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)
2	1 4	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	27 Laporan	100 %	19,200,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21, 28 %	19,200,000	
						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern				53,49 %					Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53, 49 %		
2	1 4	3	2.03	1 3	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Tersedianya Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	32 Orang	100 %	2,863,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21, 28 %	5,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)	
2	1 4	3	2.04		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern					53,49 %						Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53, 49 %		
2	1 4	3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								707,250,000						869,149,60 0
2	1 4	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terlaksananya Kampung KB yang melakukan pembinaan	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,28 %	41 Kampung	41 Kampung KB	707,250,000	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	21, 28 %	869,149,60 0	
					Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern					53,49 %					Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	53, 49 %			
2	1 4	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								3,665,852,3 78					4,095,100, 000	
2	1 4	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								3,612,520,1 35					3,988,775, 760	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
2	1	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembangunan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.55 %	20 Unit	20 kelompok	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	63.55 %	363,000,000
						Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB				84,30 %				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	84,30 %	
2	1	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembangunan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.55 %	7661 Orang	20 kelompok	3,259,100,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	63.55 %	3,259,100,000
						Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB				84,30 %						Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	84,30 %	
2	1	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembangunan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan KesejahteraanKelu arga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.55 %	16 Laporan	20 kelompok	23,420,135	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	63.55 %	37,413,640

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)
					Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB					84,30 %				Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber- KB	84, 30 %			
2	1 4	4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								53,332,243	106,324,240				
2	1 4	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terpenuhinya Kepesertaan ber KB bagi Anggota UPPKS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Purworejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.55 %	3 Organisasi	3 organisasi	53,332,243	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	63.55 %	106,324,240
						Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB				84,30 %							Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	
TOTAL													20,725,694,027	18,281,517,044				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		5.697.541.640	
	URUSAN BIDANG SOSIAL		5.697.541.640	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	82.580.000	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.728.100	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	368.157.436	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.959.942.736	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	184.230.100	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	98.903.268	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		15.028.152.387	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		15.028.152.387	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.379.699.528	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	192.670.400	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.789.930.081	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.665.852.378	
			20.725.694.027	

TABEL 4.2

SASARAN PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN

NO	PRGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terbinanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Tertanganinya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terwujudnya Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Pelayanan Anak Terlantar
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial yang Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlayaninya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tercapainya Age Specific Fertility Rate (ASFR)

NO	PRGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersusunnya Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Kependudukan
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Terlaksananya pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) / Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern
		Persentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
1	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Promosi Pembangunan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Siap Melayani KB MKJP
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Kampung KB yang melakukan pembinaan
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terwujudnya Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina
		Meningkatnya PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Kepesertaan ber KB bagi Anggota UPPKA dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo tahun 2023 disusun sebagai upaya untuk melaksanakan Visi Kabupaten Purworejo **menuju Purworejo Berdaya Saing 2025**. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai fungsi melakukan perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam mewujudkan misi tersebut diatas diperlukan dukungan semua aparatur pemerintah yang berada di semua lini.

A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purworejo
2. Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 ini merupakan tahun kedua penyusunan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra.
3. Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2023;

2. Perubahan-perubahan yang terjadi akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2023 untuk setiap triwulannya;

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Purworejo.

Dengan disusunnya Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2023.

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWOREJO


AHMAT JAINUDIN, S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691202 199101 1 001